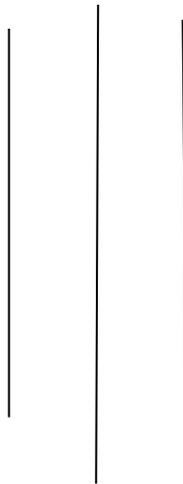




LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 23 – 25 JUNI 2022



KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2022

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	3
I.1. Dasar Hukum.....	3
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda dan Kegiatan Pada Kunjungan Kerja	4
II. HASIL PERTEMUAN.....	5
II.1. Gambaran Umum	5
II.2. Hasil Pertemuan.....	5
II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	24
III. PENUTUP	25
LAMPIRAN:	26
Foto Kegiatan	26



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 23 – 25 JUNI 2022**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 18 Mei 2022.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Untuk melihat secara langsung pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk mengetahui permasalahan yang menonjol, khususnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan atas program-program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang bermitra dengan Komisi V DPR RI yang telah, sedang berjalan dan perencanaan ke depannya.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah berdasarkan surat dari pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dengan Nomor: 005/451/PUPR dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangkep dan juga untuk melaksanakan fungsi dan tugas DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan juga melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

- butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*
- butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

- butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 23 – 25 Juni 2022, yang dipimpin oleh **Bapak H. Andi Iwan Darmawan Aras** (A-130/F-P.Gerindra/Dapil Sulawesi Selatan).

I.4. Agenda dan Kegiatan Pada Kunjungan Kerja

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melakukan pertemuan di rumah jabatan dengan Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan mitra Komisi V DPR RI beserta jajarannya dan stake holder terkait.

II. HASIL PERTEMUAN

II.1. Gambaran Umum

Kawasan Kabupaten Pangkep sering terjadi banjir akibat hujan deras dan luapan sungai, yang berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Pangkajene, pada tahun 2021 banjir melanda sejumlah Kawasan pemukiman, perkantoran, pendidikan dan pusat kota. Akibat banjir ini menimbulkan keresahan masyarakat, lumpuhnya perekonomian, terhentinya pelayanan masyarakat dari pemerintah, memacetkan jalan trans Sulawesi, Dan melanda hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pangkep.

USULAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN (PANGKEP)

II.2. Hasil Pertemuan

Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi V DPR RI melakukan pertemuan yang dihadiri Bapak H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., sebagai Bupati Pangkajene Kepulauan (Pangkep), anggota DPRD Kabupaten Pangkep, KemenPUPR, Kemenhub, BMKG, BASARNAS, dan PT Angkasa Pura I. Beberapa usulan, masukan dan kegiatan pembangunan yang menjadi topik diskusi.

1) Usulan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (PANGKEP)

- Pada pertemuan ini yang dihadiri Bapak **H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si.**, sebagai **Bupati Pangkajene Kepulauan (Pangkep)**, atas nama masyarakat Kabupaten Pangkajene Kepulauan mengucapkan terima kasih atas Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- Pada sambutan ini bapak Bupati Pangkep memaparkan kondisi terkini dan beberapa permasalahan sarana prasarana Infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Pangkep khususnya permasalahan kejadian banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep;
- Bapak Bupati Pangkep menyampaikan beberapa permasalahan masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkep yaitu perlunya mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep yang sangat merugikan masyarakat

baik ekonomi, sarana prasarana bangunan, jalan, lahan pertanian, perikanan, pasar dan terhentinya kegiatan sehari-hari masyarakat. Selain itu sarana prasarana pelayanan masyarakat yaitu kantor-kantor pemerintahan menjadi terhenti kegiatannya bila banjir terjadi;

a) Jalur Pelayaran Muara Sungai Pangkajene

- Proses pendangkalan sungai pangkajene dimulai dari muara hingga menutupi jalur pelayaran antar pulau, pendangkalan jalur pelayaran di muara sungai pangkajene yang merupakan jalur terdekat untuk menuju pulau-pulau di kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep);



- Diantara 3 jalur tersebut, jalur paling dekat menuju areal kepulauan berada di jalur selatan. Namun, jika terjadi surut, perahu harus berkeliling menggunakan jalur utara, dimana alur sisi utara ini merupakan alur paling dalam diantara ketiga alur tersebut;
- Jika terjadi surut ekstrem, lumpur sungai di alur tengah bisa terlihat dan bahkan bisa berjalan tanpa menggunakan perahu;
- Pada kondisi debit air normal, kedalaman di 3 alur tersebut adalah: Tengah dan selatan (40 – 60 cm), utara (1 – 1.3 meter);

- Sementara untuk ketinggian air yang dibutuhkan adalah 1.5 Meter tambah 0.5 meter UKC. Jadi membutuhkan sekitar 2 meter ketinggian;
- Di beberapa lokasi, khususnya di alur sungai bagian tengah dan selatan terdapat erosi tebing sungai yang berpotensi meningkatkan sedimentasi di muara yang efeknya dapat berdampak terhadap pendangkalan sungai di lokasi runtuhnya tebing sungai
- Kapal angkut terbesar yang beroperasi di muara sungai ini sekitar 3 – 5 gt, dimana kapal 5 gt berbobot sekitar 5 ton (sumber : Pemilik kapal di pelabuhan)
- Di sekitar pelabuhan, kedalaman sungai sekitar 1 – 1.5 meter (setinggi dada orang dewasa)
- Tujuan dilaksanakan normalisasi DAS Pangkajene yaitu:
 - a. Mengatasi pendangkalan aliran sungai yang ada pada muara bagian selatan DAS Pangkajene;
 - b. Memperlancar alur keluar masuknya kapal nelayan dan transportasi antarpulau di Kabupaten Pangkep;
 - c. Mengatasi banjir di areal perkotaan yang disebabkan adanya pendangkalan aliran sungai pangkajene;
 - d. Pengendalian dampak merusak dari erosi dan sedimentasi aliran sungai Pangkajene.

b) Revitalisasi Bendung Tabo-Tabo

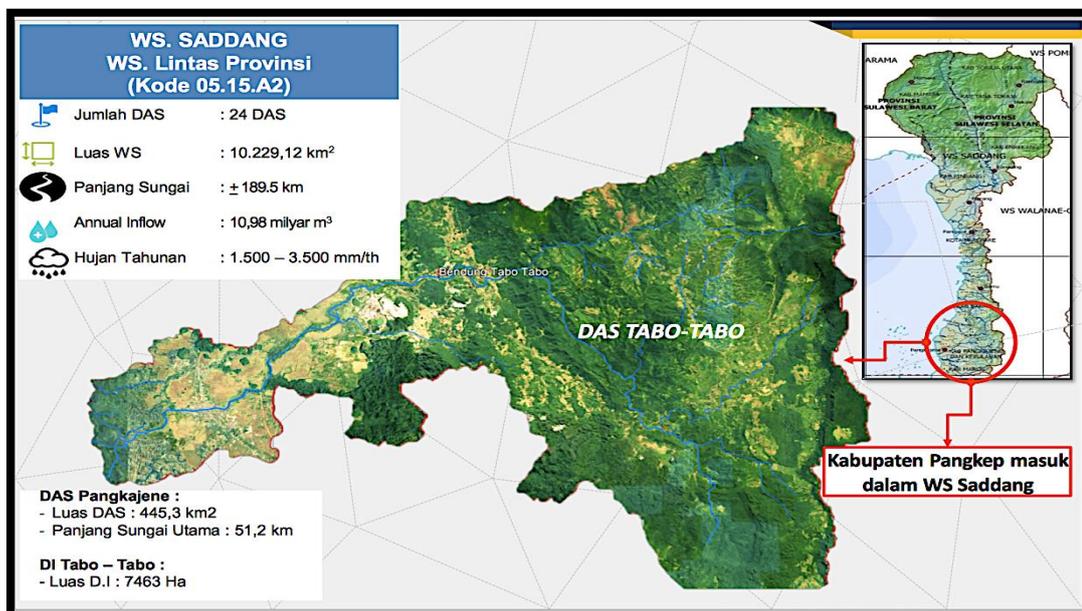


Bendung Tabo-Tabo dibangun pada tahun 1966 dan pertama diresmikan tahun 1978 (44 tahun) oleh Bapak Soeharto Presiden RI kedua, akibat banjir tahun 2013 bendung tabo-tabo jebol (kerusakan sisi kiri bending). Luas d.i. tabo-tabo sesuai Permen PUPR no. 14/prt/m/2015 yaitu Baku 8.615 Ha dan Fungsional 7.218 Ha. Melayani 5 (lima) kecamatan yaitu Pangkajene, Minasatene, Bungoro, Labakkang, dan Ma'rang. Panjang saluran 102 Km yaitu Saluran Induk 5,244 Km dan Saluran Sekunder 96,9173 Km.

Kondisi saat ini Bendung Tabo-Tabo yaitu:

- Kondisi sudah rapuh dan banyak retakan, terdapat lubang di beberapa tempat
- Terdapat banyak endapan dalam badan saluran (BT 01);
- Kondisi saluran sudah rapuh dan mengalami keretakan, juga terdapat endapan lumpur (BT 02);
- Terdapat kerusakan di beberapa titik yang menyebabkan kebocoran (Saluran Sekunder).

c) Rehabilitasi Daerah Irigasi Tabo-Tabo



- Bendung Tabo-Tabo terletak di desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Bendung Tabo-Tabo dibangun pada tahun 1978-1983, lokasi Bendung Tabo-Tabo terletak ± 45 km dari kota Makassar. Bendung Tabo-Tabo mengalirkan irigasi fungsional mencapai 7.483 Ha. Sedangkan, luas potensial 6.815 Ha, melewati saluran induk

- Tabo Tabo, kemudian terbagi di saluran sekunder padang lampe dan saluran sekunder pangkajene drainase sepanjang jalan nasional (Kalibone-Mandalle);
- Agar fungsi bendung tetap terjaga maka dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala dilakukan kegiatan: Bongkar pasangan batu, timbunan tanah dan pemasangan Bronjong pabrikan;
 - Sebelumnya, Program/kegiatan TA 2016 KemenPUPR telah menyusun dokumen lingkungan hidup jaringan Irigasi, namun desainnya masih menggunakan desain non-modernisasi.
 - Tidak ada penjelasan mengapa hal ini tidak berlanjut pada tahun berikutnya dengan program rehabilitasi lanjutan.
 - Untuk TA 2023-2024 Daerah Irigasi (D.I) Tabo-Tabo yang direhabilitasi yaitu menggunakan desain non- modernis dan apabila diharuskan menggunakan desain modernisasi maka irigasi diperlukan review desain.
 - Berdasarkan Undang-Undang no. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang berkaitan sumber pendanaan pembangunan **Daerah Aliran Sungai** terdapat pada BAB IX pasal 57 ayat 1-4, yaitu:
 - a. Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi Kawasan;
 - c. Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari:
 - Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam Penlelolaan Sumber Daya Air.

d) Pengusulan Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Pada saat ini masyarakat kabupaten Pangkep memerlukan sarana prasarana Spald-S dikarenakan ada 4.702 kk yang belum memiliki sarana prasaran tersebut. Hal ini memerlukan penanganan karena untuk mencegah menurunnya derajat kualitas air dan sanitasi yang diakibatkan oleh kegiatan pembuangan tinja, penyebaran penyakit dalam masyarakat, dan terjadinya gizi buruk dan stunting pada balita.

e) Pengusulan pembangunan Drainase dan Duiker oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Lokasi yang diusulkan yang menyangkut pembangunan drainase dan duiker Jalan Nasional Kalibone – Mandalle, yaitu:

Duiker

- Depan Kantor Bupati Pangkep, Pangkajene;
- Depan kantor BPS (Statistik), Pangkajene;
- Depan CU Kp. Bontogelang, Bungoro;
- Depan showroom Kawazaki, Bungoro;
- Kp. Bontowa sebelum SPBU, Labakkang;
- Depan MAN Ma'rang;
- Depan Pasar Bonto – Bonto, Ma'rang;
- Depan terminal segeri, Segeri;
- Pertigaan Peseng – Benteng, Mandalle;
- Depan Poloitani (2 Titik), Mandalle.

Drainase

- Kp. Maleleng ke Kantor Damkar Pangkep, Sisi Kanan 1,63 Km dan Sisi Kiri ± 300 m;
- Poros Desa Gentung – Desa Kanaungan 1,65 Km;
- Poros Talaka MAN Ma'rang 1,92 Km;
- Poros Pasar Bonto – Bonto 1,5 Km;
- Kota Segeri 1 Km;
- Poros Bone 1 Km;

- Poros Kp Peseng 1,5 Km;
- Poros Politani Mandalle 1,27 Km;

Total Panjang Drainase = 11,77 Km

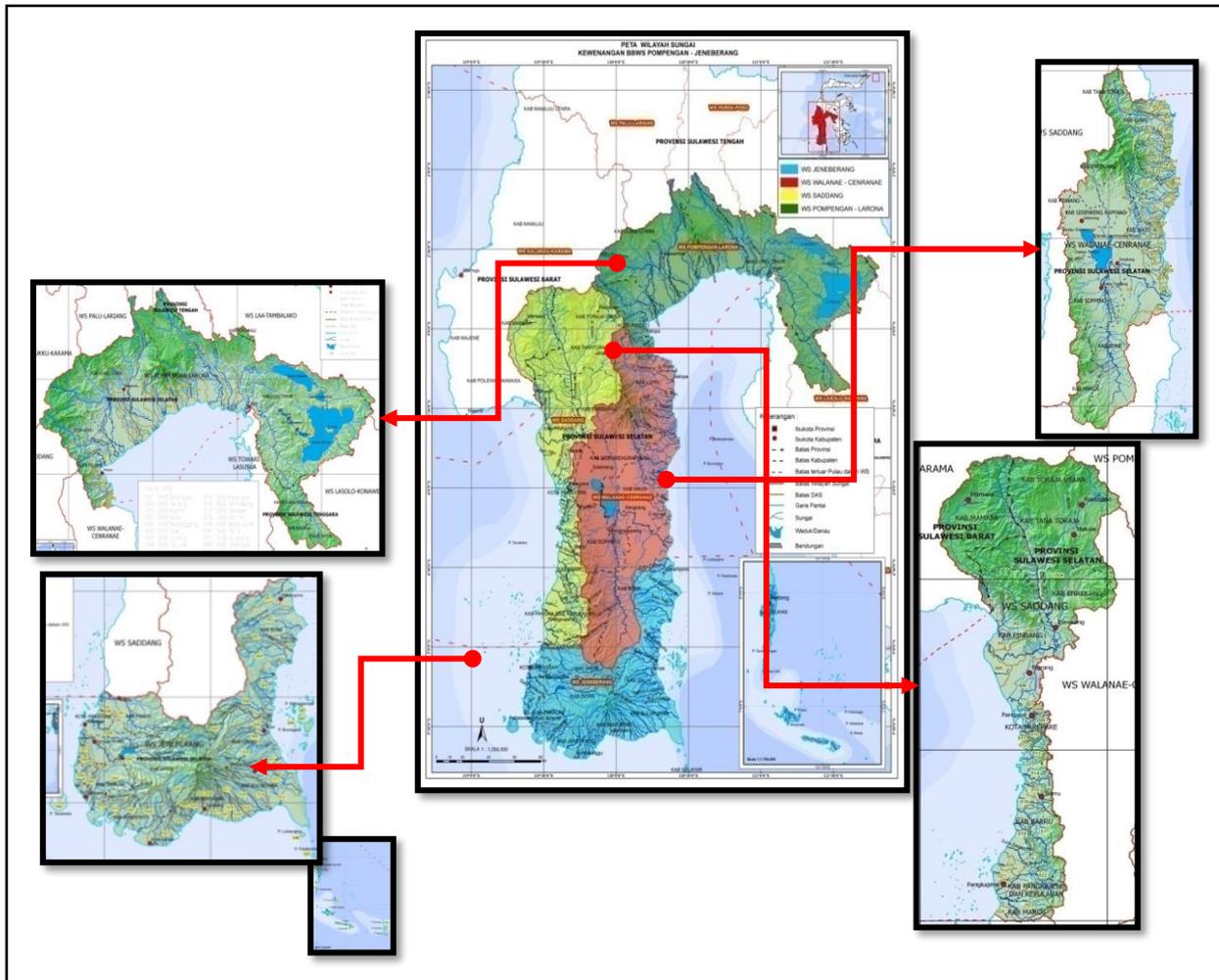
f) Pengusulan berkaitan dengan Penyeberangan ke Pulau-Pulau di Kabupaten Pangkep

Beberapa wilayah di Kabupaten Pangkep merupakan pulau-pulau yang menggunakan transportasi laut sebagai sarana perhubungan baik antar pulau maupun menuju kota di Kabupaten Pangkep. Salah satu pulau yang terluar yaitu pulau Liukang Kalmas. Jarak tempuh transportasi kapal laut antar pulau yaitu 3-4 jam dan waktu tunggu kapal datang di setiap pulauanya berkisar 6-10 hari. Salah satu sarana transportasi yaitu dengan kapal perintis yang merupakan bantuan dari pemerintah pus yaitu KM Sabuk Nusantara 66 dan KM Sabuk Nusantara 85. Kapal Perintis ini melayani 8 rute antar pulau di Kabupaten Pangkep. Pemerintah Kabupaten Pangkep mengusulkan adanya tambahan rute kapal dan mempersingkat waktu tunggu kapal datang di setiap pulauanya untuk melayani transportasi laut antar pulau di Kabupaten Pangkep. Selain itu permasalahan berkaitan dengan beberapa kapal perintis tidak dapat merapat ke pulau-pulau tersebut karena belum adanya dermaga yang memadai untuk merapatnya kapal tersebut sehingga masyarakat terkadang menggunakan perahu sebagai sarana untuk naik maupun turun dari kapal tersebut, hal ini jelas sangat berisiko bagi masyarakat yang akan menggunakan kapal perintis tersebut. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Pangkep sangat berharap adanya pembangunan sarana prasarana transportasi laut di beberapa pulau di Kabupaten Pangkep untuk melayani masyarakat sebagai penghubung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

2) Paparan Mitra Komisi V DPR RI

Pada pertemuan ini, turut hadir mitra Komisi V DPR RI yang memaparkan sejumlah program/kegiatan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pangkep. Selain mitra Komisi V DPR RI hadir juga stake holder terkait yaitu PT KAI dan PT Angkasa Pura I.

A. KemenPUPR, Ditjen Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang



Secara kewenangan, di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 4 (empat) Wilayah Sungai yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, yaitu:

- 1) WS. Pompengan Larona (13.003,98 km²);
- 2) WS. Saddang (10.229,12 km²);
- 3) WS. Walanae Cenranae (11.923,64 km²);
- 4) WS. Jeneberang (9.389,47 km²).

Pihak BBWS Pompengan Jeneberang menjelaskan kondisi sungai Pangkajene berada di DAS sungai Saddang yang sering membawa lumpur ke 24 Das di Sungai Pangkajene termasuk di Bendung Tabo-Tabo. Pengaruh curah hujan sangat mempengaruhi kapasitas tampung DAS Pangkajene tetapi pihak BBWS sudah dapat mengukur pendangkalan sebagai penyebab banjir. Untuk mengelola sungai yang

berhadapan dengan muara sungai Pangkajene karena digunakan untuk arus pelayaran dan transportasi perlunya studi yang mendalam, karena pada saat angin barat dan angin timur selalu ada perubahan sedimen sungai pangkajene. Pada waktu musim barat bisa membawa sedimen dan pada musim timur sedimen nya menghilang, sehingga memerlukan teknologi untuk penanganan sedimen di Sungai pangkajene.

Pemeliharaan Berkala Bendung Tabo-Tabo

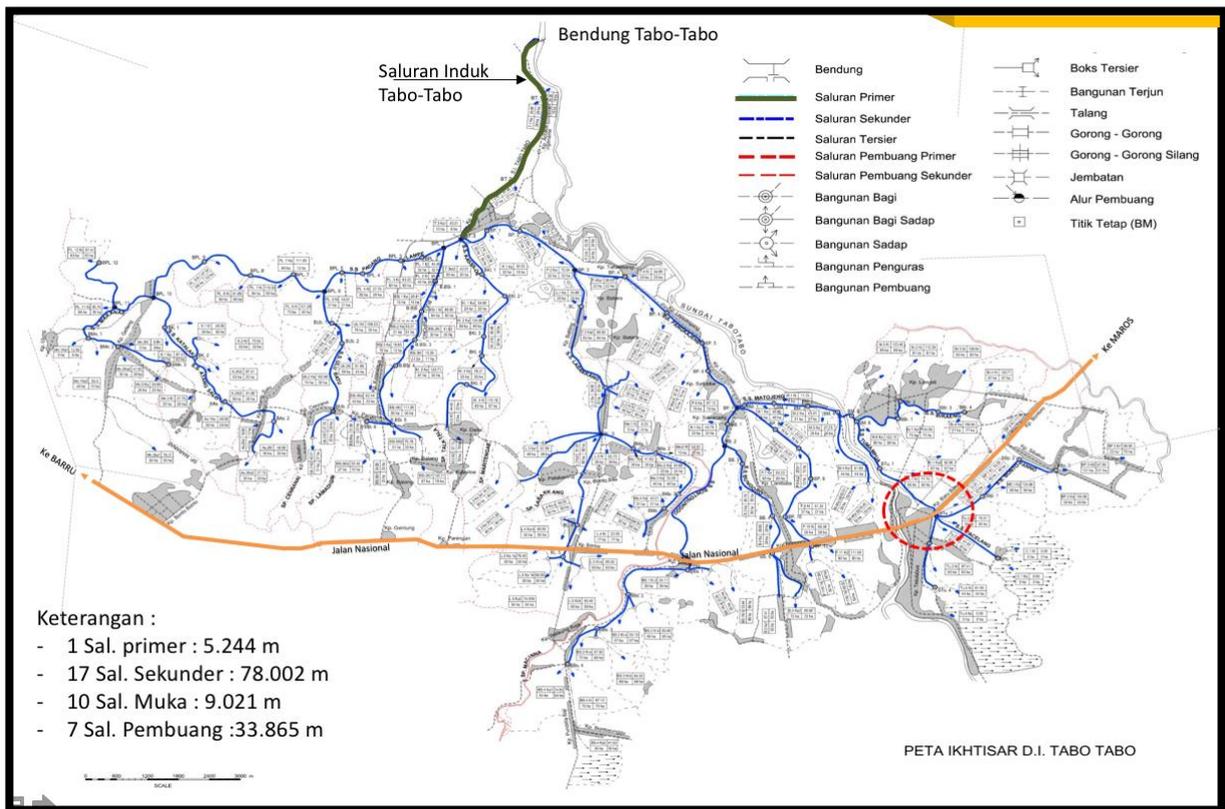
(1) Gambaran Umum

Bendung **Tabo-Tabo** berada pada titik koordinat 4°46'25.22"S dan 119°38'39,24"E terletak di desa Tabo-Tabo, kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bendung Tabo-Tabo dibangun pada tahun 1978-1983, lokasi Bendung Tabo-Tabo terletak ± 45 km dari kota Makassar. Bendung **Tabo-Tabo** mengalirkan Irigasi fungsional mencapai **8.615 Ha**. Sedangkan, luas Potensial **7.077 Ha**, melewati saluran Induk **Tabo-Tabo**, kemudian terbagi di saluran sekunder Padang Lampe dan Saluran Sekunder Pangkajene. Agar fungsi bendung tetap terjaga maka dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala.

(2) Item Kegiatan TA. 2022

- Bongkar Pasangan Batu
- Timbunan Tanah
- Pemasangan Bronjong Pabrikasi

BBWS memerlukan peningkatan fungsi bendung Tabo-Tabo menjadi bendungan, perubahan ini diperlukan karena kondisi alam, RTRW, dan kapasitas tampung air di bendung Tabo-Tabo. Saat ini bendung Tabo-Tabo hanya dapat mengairi sawah masyarakat sangat terbatas sehingga sawah masyarakat hanya bisa panen setahun sekali. Review desain bendung Tabo-Tabo dan irigasi akan dimulai tahun 2023 dan akan diusahakan bila memungkinkan di tahun 2022. Untuk penanganan banjir di kabupaten Pangkep akan dilakukan tahun 2023 karena memerlukan kajian.



B. KemenPUPR, Ditjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Terkait mengenai drainase jalan nasional sehingga terjadi banjir di jalan nasional di Kabupaten Pangkep ada 5 KM dikiri dan kanan, ada 1,3 Km disekitar kantor Bupati Pangkep yang akan dikerjakan tahun 2022. Ada juga drainase sepanjang 12 Km kanan-kiri akan diprogram tahun 2023. Pihak BBPJN tetap melakukan pembersihan drainase untuk meminimalisir genangan banjir di jalan nasional dan meminta dukungan pihak Satker Pemkab Pangkajene dalam rangka kegiatan pembersihan tersebut. BBPJN akan melakukan perbaikan drainase disekitar kecamatan Mandale (sekitar politani).

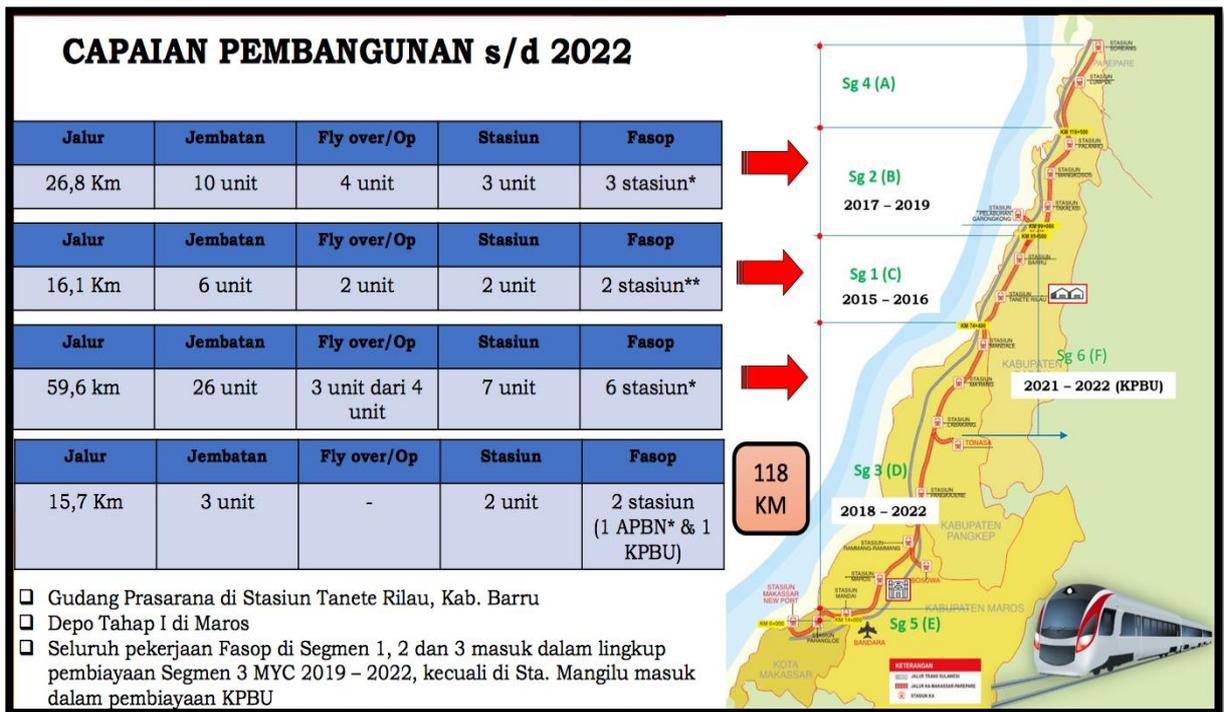
Untuk jalur Maminasata sudah siap dilakukan pembebasan lahan seksi I dan II, juga ada 23+10 bidang tanah yang menunggu dibebaskan dengan jumlah dana sebesar Rp 50 M. Untuk pembebasan lahan Seksi II dan III pihak terkait telah menyiapkan dana 107 M,

C. KemenPUPR, Ditjen Cipta karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW)

Beberapa kegiatan BPPW Sulawesi Selatan tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Pangkep yaitu Pembangunan Gedung Kuliah Politeknik Negeri Pangkep (lanjutan), Pembangunan Sanitasi Perdesaan padat Karya, BLM Pamsimas HIB dan HID MAMA, Pembangunan Infrastuktur soaisla Ekonomi Masyarakat (PISEW), BPM KOTAKU regular, Penyediaan sarana prasarana sanitasi di LPK, Sanimas SPALD-S DAN pembangunan tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS). Selain itu beberapa program yang telah dan akan dilakukan 2020-2024 yaitu penanganan kumuh perkotaan, rehab/pembangunan kawasan cagar budaya, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan Pembangunan drainase lingkungan.

D. KemenHub, Ditjen Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
Kronologis pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare:

- a. Feasibility Studi Kemenhub, Ditjen Hubdat tahun 2003;
- b. DED Jalur, pemprov Sulsel tahun 2012, DED jembatan dan Bangunan DJKA tahun 2015, DED Fasop tahun 2015;
- c. Trase, DJKA 2012;
- d. Amdal dan Larap DJKA 2015;
- e. Sampai dengan tahun 2020 telah selesai dibangun jalur dan bangunan KA sepanjang 42,5 Km, mulai Km. 74+000 s/d Km. 116+500, 5 stasiun, dan Fasop;
- f. Sampai dengan tahun 2022 ditargetkan selesai dibangun jalur dan bangunan KA sepanjang 117 Km, mulai Km. 14+000 s/d Km. 115+850, (termasuk siding 15 Km) 14 stasiun, dan Fasop;
- g. Investasi pembangunan prasarana s/d tahun 2021 sebesar Rp.5,6 T dan tahun 2022 sebesar Rp. 256 M;
- h. Pengadaan lahan s/d tahun 2021 sebesar Rp. 993 M.



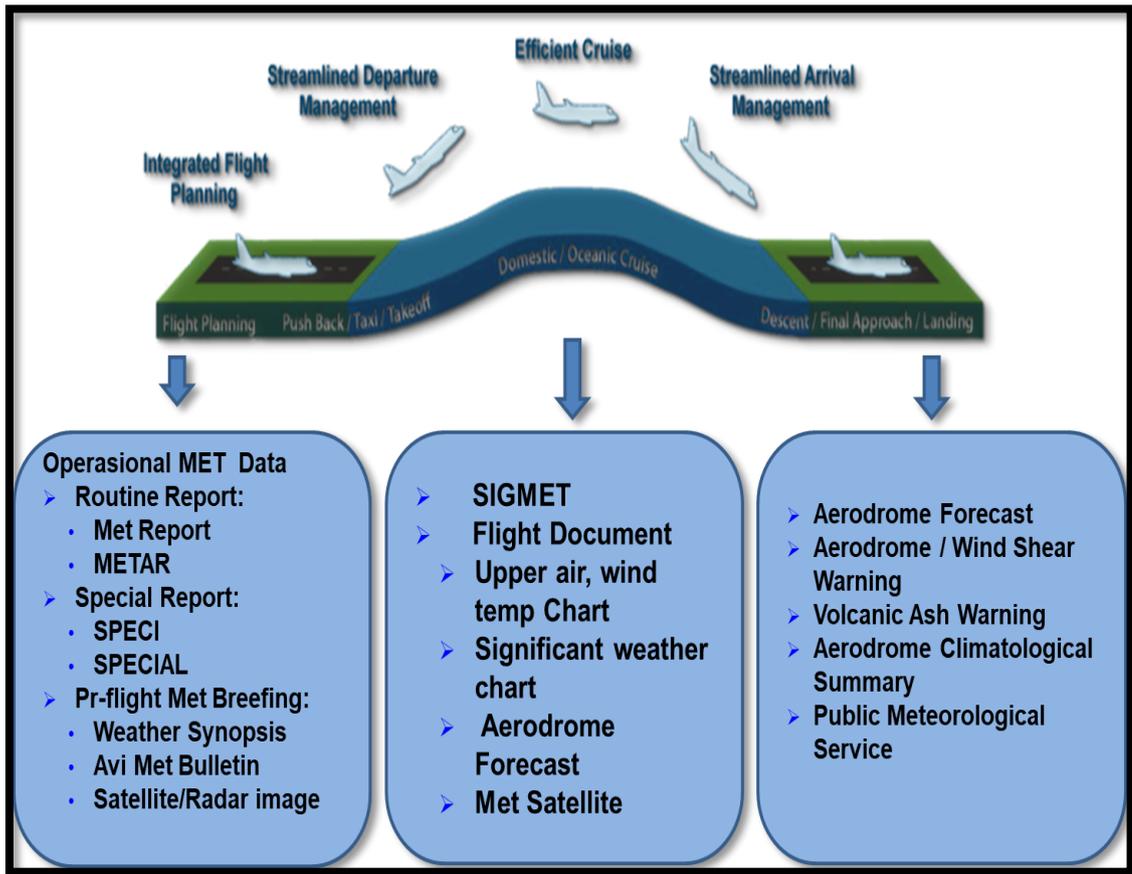
E. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar:

Produk Informasi Meteorologi:

- a. Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim
- b. Informasi Meteorologi Penerbangan
- c. Informasi Meteorologi Publik
- d. Penginderaan Jauh

Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan

Melaksanakan pertukaran data dan informasi cuaca penerbangan, sesuai ketentuan dan kebutuhan operasi penerbangan. Melaporkan kejadian-kejadian cuaca ekstrim di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat.



Layanan Informasi Maritim

- a. Peringatan dini gelombang tinggi
- b. Prakiraan cuaca perairan
- c. Prakiraan cuaca pelabuhan
- d. perairan cuaca penyeberangan



Sekolah Lapang Iklim

Sekolah Lapang Iklim atau SLI merupakan salah satu bentuk dukungan BMKG pada sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan wawasan petani tentang informasi iklim dan cuaca BMKG dan menggunakan informasi tersebut untuk kegiatan pertanian. Mengubah informasi iklim teknis menjadi bahasa praktis petani, dengan penyuluh pertanian sebagai fasilitator.



Layanan Informasi Geofisika

- Informasi peta sambarab petir;
- Informasi gempa bumi dan tsunami;
- Siaran tanda waktu nasional Indonesia
- Peta patahan dan seismisitas di wilayah Sulawesi dan Maluku;
- Live report pengamatan hilal setiap awal bulan Qamariah dan saat terjadi gerhana;
- Data terbit terbenam matahari.

Layanan Informasi Geofisika

- a. survey mikrozonasi adalah tinjauan daerah rawan gempa bumi yang dibagi dalam luas tertentu bermanfaat sebagai pedoman pemafaatan lahan untuk mengetahui zona yang aman untuk pembangunan serta hunian;
- b. Survei dan Sosialisasi Gempabumi Merusak Selayar dan Mamuju
Survei lapangan berupa kegiatan pengaplikasian geofisika yang dilakukan dilapangan menggunakan instrumen tertentu. Beberapa kegiatan survei yang dilakukan adalah mikrotremor, makroseismik, tsunami dll. Selain itu, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak bencana alam;
- c. Pengamatan Hilal, Stasiun Geofisika Gowa melakukan pengamatan hilal setiap awal bulan hijriah. Selain itu pengamatan hilal, dilakukan juga pengamatan aktivitas astronomis lainnya seperti gerhana.

Kendala operasional peralatan dan infrastruktur

- a. Pembangunan maupun renovasi kantor mkg di BBMKG WIL IV. (maritim Ambon, stamet Gorontalo, stamet Pomalaa, stamet Mamuju);
- b. Kerapatan jaringan untuk peralatan klimatologi (aws, aaws, arg) dilengkapi dengan sistem yang terintegrasi sehingga bisa dengan cepat memberikan peringatan dini;
- c. Kerapatan jaringan pemantau cuaca maritim otomatis dan terintegrasi untuk perairan di BBMKG WIL.IV;
- d. Penggantian peralatan aloptama yang sudah uzur (radar, theodolite, awos dll);
- e. Kerapatan jaringan pemantau gempa bumi dan tsunami di titik rawan kejadian, teropong hilal, peralatan survey dan kendaraan operasional lapangan;
- f. Penambahan perangkat untuk sistem disseminasi informasi meteorologi klimatologi maupun geofisika.

F. BASARNAS, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar

Wilayah Kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dengan gugusan pulau-pulau sebanyak 504 pulau, membuat banyak warga berprofesi sebagai Nelayan dan topografi Sulawesi Selatan yang memiliki gunung sebagai jalur pendakian menjadi kerawanan untuk mengancam jiwa manusia.



OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL KLM. LADANG PERTIWI 02 DI PERAIRAN PULAU PAMANTAUANG KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP

Kronologis:

Kapal KLM. Ladang Pertiwi 02 berlayar pada rabu, 25 Mei 2022 pukul 17.00 wita dari pelabuhan paotere makassar menuju ke Pulau Pammantauang Kec. Liukang Kalmas Kab. Pangkep (sekitar 140 nm) dengan estimasi perjalanan (12 jam) dan diperkirakan tiba pada tanggal 26 mei 2022. Namun hingga tanggal 27 Mei 2022 Klm Ladang Pertiwi 02 tidak berlabuh sesuai rencana. pada tanggal 28 Mei 2022, dilaporkan bahwa KLM Ladang Pertiwi 02 dinyatakan tenggelam setelah 7 orang pob (personal on board diselamatkan oleh Kapal TB. Sabang 02 yang melintas di sekitar lokasi. Diketahui kapal tenggelam di sekitar perairan Pulau Pammantauang pada tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita.

Pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 08.30 wita, setelah menerima laporan, KN SAR Kamajaya 104 milik BASARNAS Makassar bergerak menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban. Data dan informasi dari nahkoda kapal yg ditemukan selamat menyatakan ada 50 orang yg ikut bersama dalam KLM Ladang Pertiwi 02 dalam pelayaran tersebut. Proses pencarian dilakukan selama 7 hari dan diperpanjang selama 3 hari menjadi total 10 hari pencarian dengan hasil 31 orang ditemukan selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia dan 15 orang tidak ditemukan (dinyatakan hilang).

Faktor pendukung keberhasilan operasi SAR :

- Kesiapan Personel dalam kondisi prima;
- Alut operasional dalam keadaan laik pakai;
- Unsur SAR yang terlibat pro aktif dan berpengalaman serta memiliki kompetensi SAR;
- Alut pendukung dari Potensi SAR yang ada di Makassar siap digunakan.

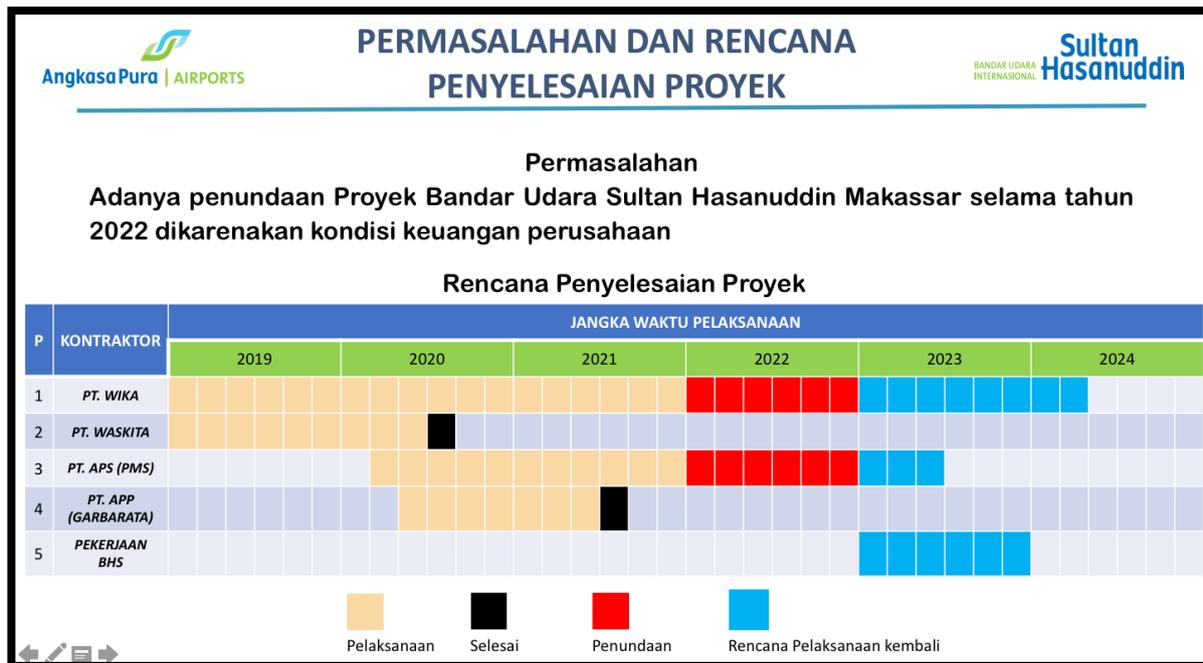
G. PT Angkasa Pura I, Makassar

Bandar Udara Sultan Hasanuddin dimulai pembnagunan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk bandar Udara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin terdiri luas terminal saat ini 61.820 m² menjadi 166.005 m², peningkatan pelayanan penumpang saat ini 10 Juta/tahun menjadi 15 juta/tahun, jumlah jembatan penghubung



dari terminal ke pesawat dan sebaliknya (Aviobrigde) saat ini 6 unit akan menjadi 12 unit dan parkir Stand saat ini 33 akan menjadi 57.

Permasalahan penundaan proyek bandara Udara Sultan Hasanuddin selama tahun 2022 dikarenakan kondisi keuangan perusahaan dan rencananya penyelesaian proyek di tahun 2024.



3) Usulan dan masukan ketua dan anggota Komisi V DPR RI

Beberapa poin-poin yang menjadi diskusi pada pertemuan ini yaitu:

- Berkaitan dengan permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Pangkep, agar Kementerian PUPR melakukan perencanaan dan langkah-langkah strategis penanganan banjir, pendangkalan DAS Pangkep, perbaikan drainase jalan Nasional, Bendung dan D.I. Tabo-Tabo di wilayah Kabupaten Pangkep;
- Penanganan Pendangkalan DAS Pangkep perlu segera dilakukan karena menjadi akses masuk masyarakat antar pulau ke kota Pangkep dengan menggunakan transportasi laut (kapal);
- Perlunya mitra Komisi V DPR RI dapat berperan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pangkep;
- Untuk meningkatkan transportasi antar pulau di Kabupaten Pangkep, perlunya pihak Balai Transportasi Darat Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, agar mengusulkan ke Menteri Perhubungan program pelabuhan penyeberangan (feri)

- dengan dukungan PT ASDP Indonesia Ferry agar pelayanan transportasi laut antar pulau untuk masyarakat Kabupaten Pangkep dapat terlayani dengan maksimal;
- Mendukung usulan pemerintah Kabupaten Pangkep berkaitan dengan penambahan rute transportasi laut antar pulau dan pembangunan sarana prasarana transportasi laut antar pulau yaitu pembangunan dermaga di setiap pulau di Kabupaten Pangkep;
 - Memberikan apresiasi kepada Kemenhub berkaitan progres penyelesaian pembangunan rel kereta Makassar-Pare-pare, dan mengharapkan agar transportasi kereta api Makassar-Pare-pare segera terwujud sehingga dapat melayani masyarakat Sulawesi Selatan;
 - Mengusulkan kepada Kemenhub Ditjen Perhubungan Udara, bahwa perlu adanya pembangunan Bandar Udara Perintis untuk masyarakat di pulau terluar (Kecamatan Liukang Mas). Bandar Udara yang dimaksud yaitu dapat melayani pesawat berukuran kecil (kurang dari 6 ton) yang berfungsi melayani masyarakat khususnya yang bersifat Emergency seperti pasien sakit berat dan pelayanan lainnya;
 - Mengapresiasi kegiatan BASARNAS yang telah berperan besar berkaitan penanganan operasi SAR kecelakaan kapal KLM. Ladang Pertiwi 02 di perairan Pulau Pamantauang Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep;
 - Mengapresiasi kepada BMKG yang telah dengan baik berkordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi berkaitan dengan informasi System Peringatan Dini (Early Warning System) di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Agar seluruh mitra Komisi V DPR RI dan stake holder melakukan perencanaan dan langkah-langkah strategis atas usulan pembangunan dan permasalahan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi.

II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) adalah:

1. Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk segera merencanakan dan melaksanakan optimalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pangkajene sebagai upaya untuk mencegah banjir yang sering melanda di Kabupaten Pangkep;
3. Komisi V DPR RI meminta kepada mitra Komisi V DPR RI untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan stakeholder terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep);
4. Komisi V DPR RI meminta kepada Kemenhub untuk merencanakan dan melakukan pembangunan sarana prasarana pendukung yang berkaitan konektivitas antar pulau baik transportasi laut maupun transportasi darat (penyeberangan) di Kabupaten Pangkep;
5. Komisi V DPR RI mengapresiasi atas segala kegiatan yang telah dilakukan oleh Mitra Komisi V DPR RI di wilayah Kabupaten Pangkep dan agar terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat;
6. Komisi V DPR RI meminta kepada seluruh mitra agar memberdayakan penyediaan jasa lokal pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Pangkep.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Juni 2022. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan agar dapat ditindaklanjuti Pemerintah, khususnya mitra Komisi V DPR RI untuk melakukan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia pada umumnya.

KETUA TIM

H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS
A-130

LAMPIRAN:

Foto Kegiatan









